

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar

Dedeh Rahwati

Alumni Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh. Jl. R.E Martadinata No. 150 Ciamis 46251 Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

email: dedehrah@gmail.com

Abstrak – Paper ini bertujuan untuk menyampaikan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan dalam meningkatkan mutu sekolah. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan keputusan (*verification*). Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan seluruh stakeholder pendidikan dalam mendukung perencanaan penyusunan mutu serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam penyusunan atau pemetaan mutu. 2) Adanya hambatan-hambatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah yang antara lain kegiatan evaluasi diri sekolah sebagai alat atau instrument internal yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja sekolah belum optimal mengingat belum semua guru dan orang tua siswa memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi diri sekolah. 3) Adanya upaya-upaya upaya mengatasi hambatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah yang antara lain memperbaiki hasil pemenuhan mutu, meningkatkan target yang belum tercapai, memperbaiki hasil temuan, peningkatan aspek yang memungkinkan, dan penetapan sasaran mutu lebih meningkat sehingga setiap aspek dapat dilakukan tindak lanjut dan perbaikan guna meningkatkan mutu sekolah.

Keywords : *Implementasi; sistem penjaminan mutu; pendidikan; mutu sekolah*

1. Pendahuluan

Perhatian terhadap penjaminan mutu telah menjadi isu penting di hampir seluruh organisasi baik organisasi yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba, baik sektor swasta maupun sektor publik, baik organisasi penghasil barang maupun penghasil jasa. Sektor pendidikan yang merupakan sektor publik adalah salah satu lembaga yang dituntut untuk menempatkan mutu sebagai perhatian utama karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Perhatian terhadap isu penjaminan mutu ini belum diikuti dengan perhatian terhadap penambahan ilmu dan informasi tentang hal-hal yang menyangkut penjaminan mutu tersebut. Konsep-konsep penjaminan mutu masih dilandasi pemikiran pemikiran tradisional, yang masih banyak dikaitkan dengan urusan inspeksi atau kontrol mutu. Masih banyak yang beranggapan bahwa penjaminan mutu sama dengan kontrol mutu, yang meliputi aktifitas *checking*, deteksi dan inspeksi.

Dalam bidang pendidikan misalnya, pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan tentang pembagian tugas dan koordinasi kegiatan-kegiatan penjaminan mutu pendidikan di antara pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan pemetaan dan pengukuran, analisis serta kegiatan-kegiatan peningkatan

mutu dan kapasitas sekolah sebagai satuan pendidikan. Semua kegiatan-kegiatan penjaminan mutu ini merujuk pada ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Standar Nasional Pendidikan.

Namun semua kegiatan yang tercakup dalam peraturan menteri tersebut belum mencerminkan sebuah sistem manajemen kualitas menyeluruh yang menyentuh semua sisi penjaminan mutu. Manajemen kualitas mutu yang banyak dikampanyekan adalah penerapan sistem manajemen yang belum benar-benar menyentuh sisi mutu yang sesungguhnya dan pelaksanaannya masih terbatas pada konsistensi dan kesesuaian dokumen administrasi kegiatan satuan pendidikan. Semua kegiatan-kegiatan penjaminan mutu ini merujuk pada ketentuan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Standar Nasional Pendidikan.

Untuk itu diperlukan sebuah usaha untuk mendorong dan memotivasi warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk lebih mengenal dan mempelajari konsep mutu dan berbagai pendekatan, teknik dan inovasi yang terkait dengan mutu. Sistem manajemen mutu sebagai sebuah pendekatan dalam mewujudkan program penjaminan mutu sangat penting untuk ditempatkan sebagai kajian-kajian ilmiah dalam rangka pengukuran dan prediksi tentang kesiapan lembaga pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas atau bermutu dapat ditunjukkan oleh kemampuan dalam menciptakan proses pendidikan atau proses manajemen sekolah yang efektif dan efisien, oleh karena itu sumber daya yang ada harus betul-betul profesional. Dalam hal ini sekolah sebagai suatu institusi yang melaksanakan proses pendidikan dalam tatanan mikro menempati posisi penting karena di lembaga inilah setiap anggota masyarakat dapat mengisi proses pendidikan dengan tujuan mempersiapkan mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan agar lebih mampu berperan dalam kehidupan masyarakat.

Mutu sekolah merupakan representasi dari kinerja semua sumber daya yang ada di sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai upaya mewujudkan tujuan sekolah. Mutu sekolah diperoleh dari keseluruhan kinerja sumber daya sekolah yang saling terkait, yaitu: kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite sekolah. Mutu sekolah dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dari pimpinan sekolah yang berfungsi menjalankan seluruh sumber daya sekolah untuk dapat menjalankan tugas secara profesional. Sekolah adalah lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai dasar rujukan untuk mengukur mutu sekolah. Dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penilai mutu sekolah tersebut tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2013.

Menurut Depdiknas (2005:4) yang menjadi indikator penilaian mutu sekolah, diadaptasi dari komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Standar yang menjadi penilaian mutu sekolah terbagi tiga, yaitu: 1) standar input, mencakup aspek tenaga kependidikan, aspek kesiswaan, aspek sarana dan pembiayaan, 2) standar proses mencakup, aspek kurikulum dan bahan ajar, aspek PBM, aspek penilaian, aspek manajemen dan kepemimpinan, 3) standar output, mencakup 2 aspek prestasi belajar siswa, aspek prestasi pendidik dan kepala sekolah, serta aspek prestasi sekolah.

Sekolah yang berprestasi merupakan dambaan setiap komponen masyarakat, dan menaruh perhatian besar terhadap kuantitas dan kualitas output sekolah yang dihasilkan. Dalam kondisi seperti ini jelas sulit diharapkan untuk mewujudkan sekolah berprestasi. Banyak masalah yang diidentifikasi oleh sekolah. Pertama adalah guru, dalam hal ini memiliki kecerdasan dan intelegensi, emosional spiritual, dan moral dalam mendidik akan menghadapi kendala dalam melaksanakan tugasnya disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru. Kedua, kurangnya fasilitas pengajaran yang mendukung guru melakukan inovasi pada aktifitas pembelajaran. Ketiga, kurangnya kejelasan tugas-tugas yang diemban atau mungkin terlalu banyaknya tugas yang diberikan kepadanya, sementara tenaga yang tersedia sangatlah terbatas. Keempat, adalah biaya. Kelima adalah kurang tersedianya sarana fasilitas pendukung seperti tenaga administrasi, laboratorium dan perpustakaan.

Sedangkan di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya sendiri untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu lembaga pendidikan tersebut sudah mulai bertahap mengimplementasikan mutu. Meskipun masih banyak kekurangan dan kendala akan

tetapi SD Negeri 2 Gunungpereng secara terus menerus berupaya untuk memperbaiki dan dengan cara inilah mutu akan tercapai sesuai dengan visi dan misi yang sudah direncanakan.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Negeri 2 Gunungpereng diketahui bahwa mutu sekolah masih harus ditingkatkan, hal ini sesuai dengan pencapaian prestasi SD Negeri 2 Gunungpereng yang masih rendah, hal ini dikarenakan bahwa selama periode waktu tahun pelajaran mulai 2015/2016 mutu sekolah belum pernah meraih predikat sekolah dengan prestasi terbaik. Selanjutnya, berdasarkan data ketercapaian keberhasilan pada evaluasi belajar secara nasional (UN) untuk tahun 2016, rata-rata prestasi yang diraih masih sangat jauh dari harapan. Dari bidang studi yang di ujikan, hanya bidang studi matematika yang mencapai rata-rata (7.69%) dalam kategori baik, sedangkan yang lainnya masih dalam kategori cukup.

Jika dicermati hasil tersebut di atas, tentunya apa yang diharapkan terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah tentunya ini belum memuaskan. Baik bagi pihak sekolah, siswa, orang tua siswa maupun masyarakat dan pemerintah. Untuk menghasilkan output dari proses pembelajaran maka perlu mengembangkan seluruh potensi sumber daya sekolah melalui pelayanan bimbingan dan pelatihan kepada siswa secara intensif, penambahan waktu belajar dan penguatan terhadap remedial bagi siswa yang belum tuntas belajar, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan melakukan review ulang program kerja yang telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh personel sekolah. Menurut pengamatan peneliti salah satu faktor rendahnya prestasi siswa ditentukan oleh kurangnya mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Adapun tujuan meneliti yang dilakukan adalah untuk melihat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipatif. Partisipatif adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, dan diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian meliputi perilaku, persepsi, tindakan yang sifatnya holistik dan naturalistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data model interaktif, dengan komponennya yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sekolah telah melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam mewujudkan sekolah bermutu di SD Negeri 2 Gunungpereng yang dibuktikan dengan dilaksanakannya tahapan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, yang antara lain:

1. Penetapan Standar di SD Negeri 2 Gunungpereng

Penetapan standar mutu merupakan tahapan awal dalam sistem penjaminan mutu. Standar mutu adalah sebagai gambaran mutu yang akan dicapai sekolah. Selain itu menurut pendapat Nanang Fattah (2012: 3) bahwa stakeholder pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu. Perbedaan persepsi ini berimplikasi bagi sekolah atau institusi pendidikan akan perlunya menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan. Oleh karena itu, kedudukan standar mutu memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu.

Peningkatan mutu pendidikan khususnya pada satuan pendidikan memerlukan adanya kepala Sekolah yang handal, tangguh dan berkemampuan yang secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada semua peserta didik. Kepala Sekolah yang handal diharapkan dapat menjadi lokomotif dan kekuatan untuk membimbing, menjadi contoh, serta menggerakkan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, program penguatan kemampuan kepala Sekolah perlu memasukkan pembahasan mengenai EDS, yang merupakan bagian penting dalam kompetensi manajerial, sebagai salah satu topik yang harus diketahui dan dipahami secara benar untuk selanjutnya dilaksanakan oleh para kepala Sekolah.

Penetapan standar mutu di sekolah mengacu 8 standar nasional pendidikan dengan selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan, serta mempertimbangkan visi, misi, dan kemampuan sumber daya sekolah. Dalam menetapkan standar mutu melibatkan perwakilan dari masing-masing unit kerja, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Setelah sekolah menetapkan standar mutu, maka langkah selanjutnya adalah Sekolah melakukan pemetaan mutu. Pemetaan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk memetakan mutu 8 standar nasional pendidikan.

Pemetaan mutu 8 standar nasional pendidikan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat. Gambaran mutu Sekolah ini sebagai feedback untuk melakukan improvement mutu Sekolah melalui penyusunan program dan kegiatan peningkatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja. Pengumpulan data penjaminan mutu pendidikan ini akan berguna bagi peningkatan mutu pendidikan jika dikelola dengan baik, dianalisa secara seksama serta dapat mudah diakses oleh stakeholders dalam rangka pembuatan rencana, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan membangun budaya peningkatan mutu. Lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang terkait dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan memegang tanggung jawab yang besar dalam pengumpulan dan pengelolaan data penjaminan mutu pendidikan ini, sehingga data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan. Ada prosedur tata kerja yang jelas, strategi, kerjasama, dan kolaborasi antar lembaga atau institusi yang terlibat dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan serta dilakukan secara terus menerus. Bahkan jika disertai dengan program peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan akan memperkuat dampaknya terhadap penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan. Fattah (2019 :12) menyatakan bahwa penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan komponen produk sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders. *Stakeholders* dalam dunia pendidikan adalah orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang mutu.

Penetapan standar mutu pendidikan dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah. Upaya-upaya strategis jangka panjang yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, antara lain upaya tersebut diwujudkan dalam penetapan standar pendidikan yang jelas dan satu sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi diantara berbagai institusi yang terkait. Data hasil penelitian menunjukkan penetapan standar mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah baik. Standar mutu bagi SD Negeri 2 Gunungpereng adalah sebagai acuan program pengembangan sekolah, sebagai arah dan koridor dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan sekolah, dan sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Data penetapan standar mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari dasar yang digunakan sekolah dalam penetapan standar mutu dan pihak yang terlibat dalam penetapan standar mutu. Dasar penetapan standar mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, penetapan standar mutu mempertimbangkan kebutuhan sekolah, dan penetapan standar mutu mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah. Dari rangkuman hasil penelitian diketahui bahwa dasar yang digunakan sekolah dalam menetapkan standar mutu adalah visi dan misi sekolah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar standar nasional pendidikan.

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pengawas sekolah sehingga diperoleh kesimpulan, dasar penetapan standar mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng mengacu pada 8 standar nasional pendidikan dengan selalu menyesuaikan peraturan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, dan Standar nasional pendidikan. Penetapan standar mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng juga berdasar pada kebutuhan sekolah yaitu berupa rumusan visi dan misi sekolah, serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya sekolah.

Dasar yang digunakan SD Negeri 2 Gunungpereng dalam penetapan standar mutu, sejalan dengan hasil penelitian Musyafa' Fathoni dalam Disertasinya dengan judul "Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu (Studi Multi Situs di SD Al Falah Tropodo 2 Sidoarjo, SDIT Bina Insani Kediri, dan SDIT Al Hikmah Blitar)", dimana pengelola sekolah dalam menetapkan standar mutu berpijak pada idealisme sekolah (cita-cita pendirian, visi sekolah, dan profil lulusan yang diharapkan). Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penetapan standar mutu adalah: kebutuhan dan ketrampilan yang harus dikuasai anak usia sekolah dasar, kebutuhan orang tua, keyakinan keagamaan, faktor ekonomi, dan faktor sosial.

Dalam menetapkan standar mutu yang perlu menjadi perhatian sebagaimana dijelaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 49) adalah dengan melibatkan seluruh komponen sekolah. SD Negeri 2 Gunungpereng dalam menetapkan standar mutu melibatkan seluruh komponen sekolah, bahkan melibatkan juga pemangku kepentingan di luar sekolah. Dari wawancara peneliti dengan Ketua TPMPD diperoleh keterangan bahwa pelibatan seluruh komponen sekolah yaitu melalui perwakilan dari masing-masing unit kerja yang ada di SD Negeri 2 Gunungpereng serta melibatkan juga komite sekolah. Sementara untuk pelibatan pemangku kepentingan di luar sekolah yaitu dari Dinas pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh pengawas sekolah.

2. Pemetaan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng

Pemetaan mutu 8 Standar Nasional Pendidikan didukung bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu Sekolah secara akurat. Gambaran mutu Sekolah ini sebagai feedback untuk melakukan improvement mutu Sekolah melalui penyusunan program dan kegiatan peningkatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja. Data hasil penelitian menunjukkan pemetaan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah baik hal ini dikarenakan pemetaan mutu bagi SD Negeri 2 Gunungpereng bermanfaat dalam beberapa hal, yaitu: a) sebagai evaluasi dan koreksi, b) agar dapat diketahui sampai dimana standar mutu itu dilaksanakan, c) mengetahui ketercapaian sebagai feedback untuk melakukan improvement, dan d) memperoleh gambaran yang jelas situasi dan kondisi sekolah pada waktu tertentu. Data pemetaan mutu diperoleh dari pemetaan berdasarkan hasil EDS, pemetaan pada 8 Standar Nasional Pendidikan, pemetaan didukung bukti fisik dan pemetaan menggambarkan mutu sekolah.

Pemetaan berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah termasuk kategori baik. Pelaksanaan evaluasi diri sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng dilakukan untuk memetakan mutu 8 standar nasional pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen evaluasi diri sekolah SD Negeri 2 Gunungpereng yang berisi pemetaan mutu 8 standar nasional pendidikan. Pemetaan dilakukan per standar nasional pendidikan, per komponen standar nasional pendidikan, sampai pada per indikator standar nasional pendidikan. Pemetaan pada setiap indikator didukung dengan bukti fisik serta penjelasan kondisi yang telah dicapai pada setiap indikatornya. Selanjutnya diberikan nilai tahapan pengembangan pada setiap indikator dengan skala 1 sampai 4 sesuai bukti fisik yang ada dan kondisi yang telah dicapai. Dengan demikian, pemetaan mutu melalui evaluasi diri sekolah yang dilakukan SD Negeri 2 Gunungpereng mampu menggambarkan mutu sekolah secara akurat

3. Penyusunan rencana pemenuhan di SD Negeri 2 Gunungpereng

Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk rencana kerja sekolah berupa rencana kerja jangka menengah maupun tahunan. Dari hasil penelitian menunjukkan penyusunan rencana kerja di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah baik. Data penyusunan rencana kerja yang masuk diperoleh dari persiapan sekolah dalam menyusun rencana kerja, dasar penyusunan rencana kerja, isi rencana kerja, pengesahan rencana kerja, dan sosialisasi rencana kerja.

Sekolah sebagai suatu lembaga/institusi mempunyai satu tujuan atau lebih. Dalam langkah mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan Sekolah tercermin dalam bentuk visi dan misi sekolah. Untuk mencapai visi dan misinya, termasuk dalam meningkatkan mutu guru semua Sekolah harus menyusun perencanaan program Sekolah

dan kegiatan Sekolah yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah. Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa "setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional". Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam proses manajemen, tidak terkecuali dalam meningkatkan kinerja guru. Perencanaan kinerja guru merupakan tindakan untuk masa yang akan datang demi tercapainya visi dan misi suatu sekolah. Perencanaan kinerja guru merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumberdaya manusia (guru), dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 31) menjelaskan bahwa dalam rencana pemenuhan mutu sedikitnya berisikan tanggung jawab pelaksana, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Dalam menyusun rencana kerja, SD Negeri 2 Gunungpereng melakukan beberapa persiapan, yaitu: pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding, dan workshop unit kerja. Dasar yang digunakan dalam menyusun rencana kerja tersebut diantaranya: peta mutu hasil evaluasi diri sekolah, visi misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. Rencana kerja sekolah berisi program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/ bukti, jadwal/ bulan, dan sumber dana. Rencana kerja disahkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan komite Sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja Sekolah melalui rapat dan pembagian *hardcopy* Renstra.

Persiapan SD Negeri 2 Gunungpereng dalam menyusun rencana kerja sudah baik. Persiapan yang dilakukan berupa pembentukan tim penyusun, penyusunan skedul, study banding ke institusi lain, dan workshop unit kerja. Pembentukan tim penyusun menjadi persiapan pertama dalam penyusunan rencana kerja atau disebut juga Rencana Strategis (Renstra) di SD Negeri 2 Gunungpereng. Penyusunan Renstra menjadi tugas dan tanggung jawab unit kerja tim penjamin mutu pendidikan sekolah, sehingga seluruh tim penyusun merupakan anggota tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Dalam struktur Tim Penyusun untuk Renstra Tahun 2014-2018, Kepala Sekolah berperan sebagai penanggungjawab.

Penyusunan skedul yaitu berupa penyusunan rencana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilalui dalam penyusunan Renstra. Tujuan kegiatan ini adalah konsultasi penyusunan Renstra ke institusi lain yang terkait Kepala SD Negeri 2 Gunungpereng memberikan tugas kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan konsultasi penyusunan Renstra. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini peserta mendapat materi penyusunan Renstra meliputi: pengertian Renstra, manfaat Renstra, dan langkah-langkah penyusunan Renstra. Selain materi, peserta juga melakukan simulasi langsung penyusunan Renstra. selain itu peserta dapat mempelajari secara langsung dokumen Renstra, proses penyusunan Renstra, dan pelaksanaan Renstra di lapangan yang dapat dijadikan sebagai role model.

Bentuk kegiatan workshop yang dilakukan oleh sekolah model kepada sekolah imbas antara lain SD Negeri 2 Gunungpereng sebagai sekolah imbas diberikan form masukan Renstra. Form masukan ini diisi oleh SD Negeri 2 Gunungpereng melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah model. Form masukan berisi bidang pengembangan, kegiatan, tahun pelaksanaan, dan biaya/anggaran yang diisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Selanjutnya form masukan ini sebagai masukan Tim Penyusun Renstra untuk menyusun Renstra. Selain form masukan, sekolah memiliki dasar yang digunakan dalam menyusun rencana kerja dasar yang digunakan SD Negeri 2 Gunungpereng dalam menyusun rencana kerja meliputi: peta mutu, visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. Dari rangkuman angket terbuka diperoleh keterangan, dasar yang digunakan sekolah dalam menyusun rencana kerja yaitu: visi misi sekolah serta hasil evaluasi diri sekolah.

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah sehingga diperoleh keterangan, saat ini sekolah memiliki tiga rencana kerja sekolah yaitu Renstra, rencana pengembangan sekolah dan dokumen ISO. Renstra berisi program pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan dasar yang digunakan untuk menyusun Renstra yaitu visi misi sekolah, tujuan sekolah, kebijakan mutu sekolah, dan hasil evaluasi diri sekolah atau peta mutu. rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang berisi perencanaan SD Negeri 2 Gunungpereng sebagai sekolah imbas, sedangkan dokumen ISO merupakan rencana pengembangan sekolah berdasarkan SMM ISO 9001:2015. Kedepannya sekolah akan menyusun ketiga rencana kerja sekolah ini menjadi satu.

Dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) SD Negeri 2 Gunungpereng berisi: 1) latar belakang, identifikasi pelanggan dan stakeholder, kondisi umum dan profil sekolah, serta landasan dan acuan; 2) visi, misi, kebijakan mutu, dan nilai-nilai; 3) lingkungan strategis internal (analisis kekuatan dan kelemahan), lingkungan strategis eksternal (analisis peluang dan tantangan), dan faktor penentu keberhasilan; 4) tujuan, sasaran, dan strategi; 5) rencana kerja operasional berisi rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, dan pengukuran dan evaluasi kinerja; serta 6) penutup.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 31) menjelaskan bahwa dalam rencana pemenuhan mutu sedikitnya berisikan tanggung jawab pelaksana, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Pada rencana kerja lima tahunan SD Negeri 2 Gunungpereng berisi rencana pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang dilengkapi aspek, indikator, dan strategi pelaksanaan. Sementara dalam rencana kerja tahunannya dilengkapi dengan kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, bentuk kegiatan/bukti, jadwal/bulan, dan sumber dana. Dokumen Rencana Strategis (Rencana Kerja Jangka Menengah) disahkan oleh Kepala Sekolah.

Dari wawancara peneliti dengan pengawas sekolah diperoleh keterangan, pengesahan oleh Kepala Sekolah dilakukan dengan persetujuan komite sekolah melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh unit kerja di SD Negeri 2 Gunungpereng. Sementara Dinas Pendidikan sebatas mengetahui dan akan diperiksa saat tinjauan ke sekolah. Pada kesempatan itu juga sebagai bagian dari sosialisasi Renstra yang dilakukan sekolah, disamping masing-masing unit kerja nantinya dibagikan *hardcopy* Renstra.

4. Pelaksanaan rencana pemenuhan di SD Negeri 2 Gunungpereng

Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemenuhan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah baik. Data pelaksanaan pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari sekolah melakukan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu. SD Negeri 2 Gunungpereng melakukan pemenuhan mutu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja jangka menengah atau tahunan meliputi: pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar kompetensi lulusan, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pengelolaan, pemenuhan standar pembiayaan, dan pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 37) menjelaskan, implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di SD Negeri 2 Gunungpereng dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Unit kerja melakukan persiapan dan membuat perencanaan pelaksanaan program untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2016: 37).

Data komitmen komponen sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng dalam melaksanakan pemenuhan mutu mendapat persentase sebesar 83% sehingga termasuk kategori sangat baik. Wawancara peneliti dengan Ketua Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah, dapat dilihat dari rajin mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan mengajukan usulan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan padanya.

Sekolah bermutu sangat erat kaitannya dengan adanya keterlibatan masyarakat secara totalitas di dalamnya. Mutu menuntut adanya komitmen pada kepuasan pelanggan yang memungkinkan perbaikan pada para karyawan, siswa dalam mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan realisasi program dan kegiatan rencana kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu ini dilakukan dengan komitmen dari seluruh komponen Sekolah, sehingga pelaksanaan pemenuhan mutu dapat berjalan dengan

baik. Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungpereng melakukan pemenuhan mutu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja meliputi: pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar kompetensi lulusan, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pengelolaan, pemenuhan standar pembiayaan, dan pemenuhan standar penilaian pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 37) menjelaskan, implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan di SD Negeri 2 Gunungpereng dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Unit kerja melakukan persiapan dan membuat perencanaan pelaksanaan program untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2016: 37). Data komitmen komponen sekolah dalam melaksanakan pemenuhan mutu cukup baik. Seluruh warga Sekolah selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang memiliki jabatan fungsional di Sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah, dapat dilihat dari rajin mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan mengajukan usulan, dan tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan padanya.

Implementasi penjaminan mutu dalam konteks sistem pendidikan, dalam kerangka akuntabilitas publik penyelenggaraan pendidikan, sudah seharusnya ada. Setiap stakeholder memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan menurut Satori (2011: 12) adalah: "Serangkaian proses dan sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, program dan lembaga pendidikan". Proses penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

5. Evaluasi/audit pelaksanaan rencana di SD Negeri 2 Gunungpereng

Dari hasil penelitian menunjukkan evaluasi pemenuhan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah dilaksanakan dengan baik. Data evaluasi pemenuhan mutu diperoleh dari evaluasi melalui evaluasi diri sekolah, tujuan evaluasi, dan tahapan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan evaluasi pemenuhan mutu melalui evaluasi diri sekolah. Wawancara peneliti dengan Ketua Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah memperoleh keterangan bahwa SD Negeri 2 Gunungpereng rutin tiap tahun melaksanakan evaluasi diri sekolah yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. Evaluasi diri sekolah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kinerja sekolah atas apa yang telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah berfokus pada hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan, sehingga pedoman dalam evaluasinya berdasar indikator keberhasilan pada rencana kerja tahunan.

Selain pada hasil, evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan untuk melihat keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan di SD Negeri 2 Gunungpereng. Pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan diperlukan oleh SD Negeri 2 Gunungpereng, dengan tujuan: 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan program kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan efektifitas kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) penentuan "*lost of opportunity*", kehilangan kesempatan jika program kegiatan tidak terlaksana dengan baik, 4) mendeteksi secara dini pelemahan kinerja sekolah; 5) pengukuran tingkat efisiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai acuan penyusunan Rencana Strategi yang akan datang; dan 7) pengukuran akuntabilitas unit kerja.

Metode pengukuran dan evaluasi tersebut dilakukan dengan menetapkan petugas yang sesuai dengan bidang tugas yang sesuai, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah. Ditemukannya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan mutu menjadi salah satu tujuan dilakukannya evaluasi. Wawancara peneliti dengan kepala sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng maka dalam kegiatan evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan diskusi untuk saling menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan permasalahan baik yang dirasakan masing-masing individu maupun kelompok serta semua hal yang mendukung pelaksanaan program.

Dari permasalahan yang ditemukan selanjutnya dirumuskan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Permasalahan yang ditemui sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu beserta cara mengatasi yang dilakukan yaitu: 1) hambatan waktu dan biaya diatasi dengan cara diprogramkan atau dilaksanakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan secara berjenjang; 2) hambatan sibuk mengajar cara mengatasinya dengan cari waktu tepat untuk melaksanakan koordinasi dan pelatihan; dan 3) hambatan kurangnya sarana dan prasarana diatasi dengan cara dilakukan pemenuhan secara berkelanjutan. Selain berdasarkan permasalahan, rekomendasi perbaikan juga dirumuskan dari indikator yang belum dicapai maksimal. Rekomendasi yang dirumuskan pada dasarnya berupa: memperbaiki hasil pemenuhan, meningkatkan target yang belum tercapai, memperbaiki hasil temuan, peningkatan aspek yang memungkinkan, dan penetapan sasaran mutu lebih meningkat.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 15) bahwa luaran dari kegiatan evaluasi selain laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan, juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan. Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk jaminan atau assurance, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *quality assurance* atau penjaminan mutu.

Pada langkah akhir dilakukan evaluasi pemenuhan mutu dimana evaluasi dilakukan sekolah melalui evaluasi diri sekolah untuk melihat hasil pelaksanaan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Selain melihat hasil, evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menetapkan petugas evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala sekolah atau disampaikan pada rapat manajemen sekolah dasar. Dari evaluasi ditemukan juga permasalahan yang dihadapi Sekolah yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikannya.

Kegiatan evaluasi pemenuhan mutu juga dilakukan diskusi untuk saling menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh personil yang terlibat dalam pelaksanaan program, sehingga dapat ditemukan permasalahan baik yang dirasakan masing-masing individu maupun kelompok serta semua hal yang mendukung pelaksanaan program. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara periodik maksudnya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalnya setiap bulan, setiap caturwulan, atau setiap semester, dan ada pula yang melakukan evaluasi kinerja setiap tahun. Nawawi (2006: 73) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan. Untuk mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kerjanya masing-masing.

Penjaminan mutu akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu dipahami tentang bagaimana melakukan penjaminan mutu secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu guna mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemampuan untuk melaksanakan penjaminan mutu adalah suatu faktor penting untuk semua lembaga. Tanpa kemampuan untuk melakukan penjaminan mutu, tidak akan ada peningkatan kualitas yang dapat dicapai. Hasil penilaian dapat menjelaskan sukses tidaknya

pekerjaan yang telah dilakukan. Dari penilaian tersebut, maka dapat memberikan masukan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih produktif pada masa mendatang. Pendapat Riduwan (2009: 43) bahwa "Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja". Dimana indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical succes faktor*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indikator*). Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

3.2 Hambatan-hambatan Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan tersebut tentunya perlu dicarikan solusinya agar pelaksanaan peningkatan sekolah bermutu dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan strategi yang disusun oleh sekolah. Penjaminan mutu tersebut diatur oleh Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang pada pasal 1 diterangkan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) sebagai tujuan dari SPMI adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembukaan UUD 45, pasal 2 ayat (2) terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan atau informal.

Namun upaya-upaya pemerintah tersebut masih belum mencapai sasaran khususnya dalam mencapai SPMI sebagai suatu kegiatan yang sistemik terpadu yang dilakukan mulai dari satuan pendidikan itu sendiri. Padahal yang seharusnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan termasuk yang paling penting yaitu pada tingkat satuan pendidikan itu sendiri.

Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP no. 19/2005 pasal 49). Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis satuan pendidikan dan evaluasi kinerja masing-masing (PP no. 19/2005 pasal 65). Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (PP No.19/2005 pasal 91).

Secara singkat, implementasi SPMI terdiri dari rangkaian proses/tahapan yang secara siklus dimulai dari : (1) Penetapan Standar, (2) Pemetaan mutu, (3) penyusunan rencana pemenuhan, (4) Pelaksanaan rencana pemenuhan dan (5) Evaluasi/audit pelaksanaan rencana. Tahapan-tahapan proses SPMI ini menurut Menurut Sani, Pramuniaty dan Mucktiyany (2015:32) merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berlangsung secara *sustainable* (berkelanjutan). Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai *stakeholders* sekolah sesuai dengan amanat MBS (PP No. 19 Tahun 2005). Dalam hal ini Sekolah perlu membentuk Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah yang terdiri dari berbagai unsur *stakeholders* yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi pada sekolah.

Dalam melaksanakan SPMI, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai pembina sekolah dan fasilitator daerah juga harus dilibatkan dalam Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), sebagai wakil dari pemerintah. SPMI tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa pelibatan dan pemberdayaan berbagai *stakeholders* sekolah, termasuk wakil pemerintah. Melalui SPMI, sekolah dapat melaksanakan program manajemen yang berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya masih belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai rencana peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

3.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Sistem Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab dari berbagai pihak. Penjaminan mutu pendidikan terutama pelaksanaannya berada pada satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari seluruh komponen satuan pendidikan untuk merencanakan dan melaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sementara pemerintah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu.

Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2016: 37). Data komitmen komponen sekolah dalam melaksanakan pemenuhan mutu diketahui bahwa seluruh warga sekolah selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para guru yang memiliki jabatan fungsional di sekolah juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan mutu sekolah, dapat dilihat dari rajin mengikuti rapat-rapat, aktif memberi pendapat dan mengajukan usulan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan padanya.

Penerapan sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah diyakini akan dapat meningkatkan partisipasi seluruh elemen sekolah dalam menetapkan standard mutu, mengupayakan mutu, dan selanjutnya mewujudkan penjaminan mutu sekolahnya. Program kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan mutu maka kementerian pendidikan dan kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dengan tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dan tersebar mulai dari satuan atau program pendidikan yang dibina oleh pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan masyarakat memiliki keragaman layanan mutu pendidikan. Untuk mengatasi keragaman tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: (1) penetapan perangkat peraturan perundangan-undangan yang memberikan arah pelaksanaannya; (2) komitmen pemimpinnya; (3) sistem pengelolaannya; (4) koordinasi yang baik; serta (5) pengetahuan dan kesadaran tentang penjaminan mutu pada setiap individu. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara penyelenggara dan pembina pendidikan di semua tingkat dengan satuan/program pendidikan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Amri (2019 :34) menyatakan bahwa:

“Dalam lingkungan pendidikan, khususnya persekolahan, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar, karena penyelenggara pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha. Setiap komponen pemangku kepentingan yaitu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem penjaminan mutu mencakup kegiatan identifikasi capaian, menetapkan prioritas untuk perbaikan, penyediaan data untuk pembuatan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 15) bahwa luaran dari kegiatan evaluasi selain laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan, juga rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SD Negeri 2 Gunungpereng Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan seluruh stakeholder pendidikan dalam mendukung perencanaan penyusunan mutu serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam penyusunan atau pemetaan mutu. Adanya hambatan-hambatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah yang antara lain kegiatan evaluasi diri sekolah sebagai alat atau instrument internal yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja sekolah belum optimal mengingat belum semua guru dan orang tua siswa memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi diri sekolah. Adanya upaya-upaya upaya mengatasi hambatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah yang antara lain memperbaiki hasil pemenuhan mutu, meningkatkan target yang belum tercapai, memperbaiki hasil temuan, peningkatan aspek yang memungkinkan, dan penetapan sasaran mutu lebih meningkat sehingga setiap aspek dapat dilakukan tindak lanjut dan perbaikan guna meningkatkan mutu sekolah.

Daftar Pustaka

- Amri, Sofan, (2013). *Pengembangan & Model Pembelajaran Dalam Kurikulum*. 2013. Prestasi Pustakarya. Jakarta.
- Danim, Sudarwan, (2008). *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung, Pustaka Setia.
- Depdiknas, (2005). *Panduan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Direktorat PPTK dan KPT Dirjen Dikti.
- Fattah, Nanang, (2012). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja. Rosda karya.
- Fattah, (2012). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irianto, (2012). *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*, cet.8, Jakarta: Kencana.
- Kemendikbud, (2016). *Permendikbud Nomor 020 tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta: kemendikbud.
- Komariah dan Djam'an Satori, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Komariah dan Djam'an Satori, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong Lexy J., (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja.
- Mucktiany, (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasana, Dedy, (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Jakarta: Rosda. Karya.
- Riduwan, (2009). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruci.
- Sallis, (2011), *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Saputra, Lyndon (2013). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Binarupa.
- Satori, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Alfabeta.
- Sutopo, (2008). *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi. Aksara.
- _____, (2015). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada MTsN Kota Lhokeumawe*, jurnal administrasi pendidikan, pascasarjana universitas syiah kuala Vol 03, No. 02.
- _____, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- _____, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 ayat 1, 2, dan 3 tentang penjaminan mutu pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013.
- _____, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2014. *"Peran Guru dalam Menegakkan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014"*. Skripsi S-1. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.